

## NILAI-NILAI PANCASILA YANG DIPERJUANGKAN DI MASA BALITA RI TETAP RELEVAN UTUK MASA KINI<sup>1</sup>

### **1. Pengantar**

Dua tahun lalu, saya membuat penelitian tentang Pancasila di mata para perupa. (Dilakukan dengan menelusuri sejumlah karya yang muncul dalam pameran-pameran sebagaimana ada dalam katalog). Saya sampai pada kesimpulan sementara bahwa berdasar pengamatan, ada sejumlah keprihatinan yang disampaikan oleh para perupa lewat karya mereka. Bermula dari gerakan reformasi, rakyat memiliki persepsi bahwa Pancasila telah menjadi legitimasi bagi rejim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Ada diskrepansi antara idealisme dan tindakan, nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi karena menjadi slogan tanpa roh. Reaksinya menjadi antipati terhadap Pancasila dan nilai-nilainya. Pasca reformasi, keadaan juga hampir sama, nilai-nilai Pancasila tidak operasional: kekerasan merebak di mana-mana, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi meluas di berbagai kalangan. Orang tidak lagi berbicara Pancasila, dan tugu-tugu di sudut-sudut desa menjadi asesoris bisu. Dengan demikian, Pancasila yang menjadi falsafah bangsa, maupun dasar Negara, mengalami berbagai tantangan.

Adakah sekarang terjadi sebuah kebangkitan baru? Moga-moga. Saat ini menjadi kesempatan untuk mengangkatnya kembali dalam wacana publik. Untuk memperkaya diskusinya, saya mengetengahkan bagaimana Pancasila diwacanakan oleh Presiden RI, tatkala Balita RI berada dalam pengungsian di Yogyakarta. Untuk itu, saya akan mendasarkan pada Pidato Presiden Sukarno setiap hari Kemerdekaan RI. (Kebetulan dalam Catatan Harian Mgr. Soegijapranata yang jadi dasar pembuatan film *Soegija*, beliau selalu mencatat undangan dari Istana Negara tanggal 17 Agustus. Bahkan dalam catatan 17 Agustus 1948, Soegijapranata menulis, Presiden Sukarno pidato selama 2 jam.) Untuk menempatkan pada situasi masa tersebut (konteksnya), saya mendasarkan pada tulisan Mangil, dan beberapa biografi Sukarno untuk memberi konteks lebih luas. Dari sana, saya mencoba berinterpretasi bagaimana Pancasila masih tetap relevan dihidupi untuk jaman ini. Dengan cara ini, kita menggali kembali jiwa Pancasila. Sekaligus mengingatkan bagaimana praktek kenegaraan dan pemerintahan RI yang berlangsung sekarang, perlu berkaca pada usaha masa-masa sulit usia Balita RI.

---

<sup>1</sup> Dipresentasikan dalam Sarasehan Bulan Bung Karno, di Gedung DPRD DIY, 5 Juni 2012

## 2. Masa sulit Balita RI

Tidak dapat dipungkiri situasi sulit yang terjadi tatkala Belanda membonceng Sekutu untuk menancapkan kembali kekuasaannya. Sukarno-Hatta, sebagai kepala Negara dan pemerintahan memindahkan ibukotanya ke Yogyakarta yang memiliki sejumlah prasyarat untuk menjadi tempat aman bagi pengungsian pemerintahan RI yang masih baru. (Julius Pour)

Di tengah usaha-usaha melakukan sejumlah tindakan bertahan, dan melakukan manuver militer (yang dimotori oleh TRI), serta berdiplomasi (dilakukan oleh delegasi khusus), pada saat-saat tertentu Presiden RI sebagai kepala Negara terus menanamkan nilai-nilai idiil pada rakyat dan bangsa yang baru merdeka. (Selain pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan RI, pendidikan politik juga diberikan untuk kaum perempuan. Dibukukan dalam *Sarinah*. Mangil, 35-36)

Bahan untuk pertemuan ini adalah pidato-pidato Presiden Sukarno saat peringatan Kemerdekaan RI di Yogyakarta. Memang tidak secara langsung dalam formulasi Pancasila eksplisit. Moh. Yamin menyebut lima nilai pokok dari dokumen pidato kenegaraan tersebut. *Pertama*: mengandung sifat kerakyatan, yakni membawakan suara rakyat yang ber-revolusi. *Kedua*, merupakan analisa dan diagnosa yang tajam terhadap revolusi dari tahun ke tahun. *Ketiga*, menggariskan *trace* revolusi Indonesia dengan jelas. *Keempat*, pembabakan revolusi Indonesia dalam tingkat-tingkat perjuangan. *Kelima*, memelihara terus berkobarnya “api revolusi dan jiwa proklamasi”. (Sukarno, v) **Dalam konteks ini, saya mau menggaris bawahi dua hal: suara rakyat, dan jiwa proklamasi (jiwa kemerdekaan)**

Sejumlah hal yang dibicarakan dalam pidato meliputi pokok-pokok berikut:

- a. Pidato 17 Agustus 1946: memaparkan usaha dan tantangannya: dalam menghadapi tentara Belanda yang membonceng Sekutu dan jalur diplomasi yang berlangsung; menjelaskan lembaga Negara dan perusahaan negara yang mulai dibentuk untuk mengurus kesejahteraan (kemakmuran) rakyat; usaha dan kebijakan moneter untuk menggantikan uang Jepang yang masih beredar di pasaran. Inilah usaha mewujudkan RI yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya. Dalam pidatonya Presiden menyatakan....“*Kalau RI dihancurkan, maka perdamaian akan hancur; maka kesejahteraan dunia akan hancur; maka ekonomi dunia akan hancur; maka demokrasi akan hancur; maka keadilan akan hancur; maka moral akan hancur; dan sebagai gantinya akan datang kekacauan terus menerus. Kita mendirikan republik, karena kita cinta demokrasi, kesejahteraan dunia, persaudaraan bangsa.*” (Sukarno, 12) Pengalaman bangsa Indonesia yang baru merdeka diacukan menjadi bagian pengalaman dunia. Pesan tersebut, diulang di bagian akhir dengan pekikan! Rumusan sama muncul kembali pada pidato tahun berikutnya.

- b. Pidato 17 Agustus 1947: menegaskan tentang konsolidasi yang dilakukan untuk melawan pandangan bahwa RI bukan republik yang sempurna. Presiden menjelaskan dinamika perundingan, lebih-lebih terkait dengan Linggarjati dan insiden-insiden gerakan militer di berbagai wilayah. Presiden memberikan reaksi terhadap agresi militer I, dan menyebutkan, “... pidato saya tanggal 21 Juli itu, saya katakan bahwa Belanda sebenarnya menyerang perikemanusiaan, menyerang peri keadilan. ...”(26). Dalam cakrawala pembicaraan tentang kemerdekaan Negara, Presiden menyapa dan menempatkannya pada tiap pribadi, individu, anggota masyarakat, dan rakyat: “Tidak ada perdamaian sebelum ada damai di hati kita. ... Kemerdekaan adalah bersemayam di hati manusia ... dan tidak ada senjata duniawi pun dapat menaklukkan dia di tempat itu! Dan sebaliknya dari tiap individu, tiap pribadi diundang untuk terlibat, “Gemblengkanlah segala kemauan-kemauan individual menjadi satu Maha Kemauan Bangsa, dan Maha Kemauan Bangsa ini harus digembleng lebih kuat dari penderitaan apa pun, dari bahaya apa pun ...” (32-33)
- c. Pidato 17 Agustus 1948: memberikan perkembangan dari Perjanjian Linggarjati ke Renville, sikap ingkar Belanda dengan aksi militernya, dan peran KTN. Dari pihak RI diperlihatkan usaha penarikan laskar dan keyakinan pemerintahan-pemerintahan di daerah atas kuatnya kedudukan RI. “Republik adalah penjelmaan, perwujudan, kongkretisasi dari cita-cita kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, yang sudah dicapai dengan keringat, dengan darah, dengan airmata bermilyun-milyun bangsa kita ..... ” (62)
- d. Pidato 17 Agustus 1949: menegaskan dan menjabarkan perjuangan militer dan diplomasi sebagai usaha dwitunggal mengusahakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Yang mendasarinya, “Pada saat proklamasi itu, ..... kita hanyalah memiliki empat hal yang telah selesai: pertama naskah proklamasi itu sendiri; kedua bendera kebangsaan Sang Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya; ketiga falsafah negara, yaitu Pancasila; keempat, undang-undang dasar yang bersandikan kepada falsafah itu.” (68)
- e. Secara khusus dalam kaitan dengan Yogyakarta, Presiden mengungkapkan. “Seluruh dunia dapat mempersaksikan sekarang, bahwa daerah Yogyakarta adalah dalam keadaan aman, dalam keadaan complete peace ..... Adakah keamanan dan ketenteraman yang meliputi daerah sekarang ini, akan merupakan pusat keamanan yang meliputi daerah Yogyakarta, sekarang ini, akan merupakan pusat keamanan dan ketenteraman yang terus segera akan melebar dan meluas, menjembar dan memekar, mengembalikan kebahagiaan hidup bagi bangsa Indonesia seluruhnya?” (80-81)

Pokok-pokok pidato di atas memperlihatkan komunikasi Presiden dalam menjelaskan dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI. Negara RI yang diperjuangkan menjadi wadah bagi perwujudan kemanusiaan, kemakmuran, keadilan. Dilingkupi dengan perdamaian.

### **3. *Perlunya Ideologi pada Masa Sulit***

Mencermati pidato-pidato yang dikemukakan di atas, kiranya beberapa nilai yang setiap kali diungkapkan sebagai hal yang dituntut dan diperjuangkan. Sekaligus merupakan nilai yang terkait dengan Pancasila meliputi kemanusiaan, persatuan, kemakmuran, keadilan. Dalam seluruh rangkaian pidato, Pancasila disebut sekali. Ditempatkan bersama yang lain sebagai perangkat legal keberadaan Negara RI yang merdeka dan berdaulat. *(Ada pernyataan kemerdekaan (Proklamasi), ideologi Pancasila, dan landasan dasar hukum Negara, UUD yang dijiwai nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terumuskan dari Pidato pertama lahirnya Pancasila sampai pada perumusan akhirnya dalam sidang-sidang BPUPKI.)*

RI yang merdeka dan berdaulat terus diperjuangkan keberadaannya untuk mewujudkan perikemanusiaan, mewujudkan keadilan, kemakmuran, menghadirkan perdamaian. Kemanusiaan, keadilan, kemakmuran, perdamaian sebagai nilai menjadi konkret dalam berbagai situasi hidup. Dalam situasi perjuangan, antitesis terhadap nilai-nilai tersebut adalah tindakan-tindakan kekerasan, perang dengan segala akibatnya. Inilah situasi kontras tidak kondusif, sekaligus menghancurkan nilai-nilai yang diperjuangkan. Dalam sejarah Balita RI, tindak kekerasan dan perang dilakukan oleh Belanda dengan pasukan militernya. Itulah yang dijelaskan dalam pidato presiden dan dikecam, serta dilawan dengan berbagai usaha militer dan diplomasi.

Nilai-nilai ideologi memiliki dua wilayah perwujudan yakni dalam wilayah negara dan bangsa, sebagaimana dimengerti dalam teori bahwa dalam paham nasionalisme terdapat dua konsep yang tercakup di dalamnya yakni bangsa dan Negara. Dalam sebuah pengertian tentang nasionalisme yang didefinisikan sebagai 'usaha untuk menciptakan budaya dan pemerintahan yang mendukung suatu budaya dengan sebuah naungan politiknya yang mandiri' menjadikan nasionalisme sebagai sebuah realitas yang terus menerus perlu dihidupi, bukannya nasionalisme sebagai sebuah mitos masa silam atau pun slogan. Inilah yang dijelaskan Presiden Sukarno sejak kelahiran Pancasila dalam perumusannya, sampai dengan perjuangannya yang diwujudkan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI.

Kendati pun, Presiden juga menyebutkan sebagian kecil masyarakat yang menjadi kaki tangan, atau menjadi pihak yang mengganggu kemerdekaan dan kedaulatan RI yang tengah diperjuangkan. Tidak

digunakan istilah pengkhianat, melainkan sebagai pihak yang tidak paham dan melukai. Disebut juga adanya saudara di luar Republik (RI sebagai bagian dari RIS, juga memiliki Negara-negara yang memiliki kesejajarannya. (Negara lain yang ada di dalam lingkup kesatuan RIS.)

Ideologi sebagai pengikat dalam satu kesatuan bangsa yang baru, menghadirkan nilai kemanusiaan, keadilan, kesatuan yang dihidupi dalam perdamaian, terwujud dalam ikatan Negara yang merdeka dan berdaulat. Memperjuangkan perwujudan nilai-nilai tersebut secara konkret dihadirkan dengan memperjuangkan keberadaan Negara RI yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan bersenjata sebagai bentuk kehadiran tentara republik, perjuangan dalam diplomasi sebagai perjuangan politik dilakukan lewat meja perundingan.

Perdamaian yang diperjuangkan, terkait dengan keberadaan RI yang merdeka dan berdaulat (berhadapan dengan pihak luar). Perdamaian dalam keamanan dan ketenteraman di berbagai daerah (termasuk Yogyakarta) untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat/rakyat/bangsa. Kedamaian yang ditumbuhkan di dalam hati/diri tiap-tiap anggota masyarakat. Dengan demikian ada tingkat-tingkat perdamaian yang masing-masing memiliki implikasi siapa bertanggung jawab untuk mengupakannya. Dari tingkat nasional, lokal, sampai personal. Ada peraturan perundangan yang mengatur, dan aparat yang bertanggung jawab untuk menjaganya. (Pancasila ditempatkan sebagai falsafah Negara, dan landasan dasar dari hukum positif UUD RI.)

#### ***4. Nilai-nilai yang diketengahkan dari masa Balita RI***

Untuk konteks masyarakat sekarang, RI yang merdeka dan berdaulat sudah mencapai umurnya yang ke 62 tahun. Tuntutan untuk penegakan dan perwujudan nilai kemanusiaan, keadilan, yang dijamin oleh suasana perdamaian tidak lagi disuarakan pada pihak luar yang merongrong. Kita tidak lagi di dalam konteks yang memperjuangkan Negara yang merdeka dan berdaulat. Namun dalam kerangka sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, bagaimana menegakkan sistemnya, aparatnya, dan warganya sehingga mampu menjamin dan menegakkan bagi perwujudan nilai kebenaran, keadilan yang dijamin dalam suasana perdamaian. perlu menjadi warganya, perlu memikirkan untuk warga memperoleh jaminan atas perwujudan nilai-nilai tersebut di tengah berbagai nilai-nilai lain. (Kita dapat menemukan sekian kasus yang menunjukkan hal-hal yang berlawanan dari tuntutan tersebut. Maka akan senantiasa ada gugatan dan tuntutan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, (persatuan) dan perdamaian dikemukakan lagi.)

Sebagai nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, pada satu sisi menjadi urusan Negara. Negara dan pemerintah sangat berkepentingan untuk mewujudkannya. Sekaligus, nilai-nilai tersebut

juga menjadi nilai yang diajarkan pada agama dan keyakinan apa pun. Dan juga diajarkan kepada para pemeluknya untuk mengusahakan mewujudkannya dalam hidup keseharian. Dengan demikian, ada kesamaan orientasi nilai-nilai yang diajarkan dan diperjuangkan. Ada nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian yang universal. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, perdamaian. Memang dapat dibeda-bedakan. Dalam perspektif kenegaraan dan penyelenggaraannya sifatnya material, sementara, konkret. Dalam perspektif agama dengan sumber ajaran yang beragam, yang material, sementara, konkret tersebut diacukan juga pada landasan yang rohani, mempunyai horizon kekekalan hidup, akhirat. Mengupayakan “keselamatan dunia – akhirat”, “damai di hati, di bumi, dan di surga, nirwana, di hidup kekal.” Berbagai macam tradisi, aliran ajaran, dan pemikiran para tokoh-tokoh spiritual memiliki penjelasan-penjelasan lebih rinci yang memperlihatkan kekhasannya masing-masing.

Dengan demikian juga menjadi jelas, bagaimana nilai-nilai Pancasila dengan beragam penjelasannya dan penjabarannya, sekaligus juga akan menjadi acuan dan menjiwai berbagai rumusan hukum positif. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan negara, nilai yang diperjuangkan tersebut memiliki perwujudannya dengan berbagai kepastian hukum yang menjadi Dalam Negara yang dibentuk untuk mempertahankan. Dalam lingkup (bangsa yang menjadi) warga Negara yang menjadi bagian dari kesatuan bangsa, perwujudan nilainya diwujudkan dalam kaitan antar warga. Yang sebagai kesatuan bangsa akan menghadirkan diri bersama berhadapan dengan bangsa-bangsa lain.

##### ***5. Masih relevankah nilai-nilai tersebut untuk Masa Kini***

Relevansinya sebuah nilai (entah yang sangat tradisional, entah yang sekular, atau yang suci dan saleh), senantiasa akan terkait dengan kemampuannya untuk menerangi/ mencerahkan/ memerdekakan, menjawab tuntutan aktual, dan memberi makna pada tiap orang maupun kehidupan bersama. Demikian pun halnya dengan nilai-nilai yang sejak awal kemerdekaan diperjuangkan: perikemanusiaan, keadilan, perdamaian (nilai-nilai yang telah dirumuskan sebagai nilai ideal falsafah bangsa dan dasar negara. Nilai-nilai itu menjadi landasan bagi rumusan hukum positif yang menjamin hidup bersama sebagai warga Negara dan bangsa.)

Bagaimana tuntutan terhadap nilai tersebut untuk terkait dengan relevansi. Kita dapat mengajukan berbagai tanda Tanya. (Dalam situasi sekarang, bagaimana tindak kekerasan berlangsung? Siapa pelakunya? Bagaimana disikapi? Bagaimana kemanusiaan, keadilan, kemakmuran dirasakan? Siapa yang menyeleweng terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan ini? Bagaimana disikapi?) Berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan menemukan, ya nilai-nilai tersebut layak diperjuangkan.

Sebagaimana halnya, sejarah Balita RI memperlihatkan, keberlangsungan hidup saat ini tetap perlu menyuarkan dan memperjuangkan lagi: kemanusiaan, keadilan, kemakmuran dan perdamaian.

*“Negara tugasnya memelihara, menyatukan, mengatur serta mengurus kehidupan rakyat dengan bertindak yang terarah pada kesejahteraan, ketentraman, kepentingan umum yang bersifat sementara, bersifat lahiriah dan duniawi. Komunitas-komunitas agama (beriman) bertugas memelihara, membimbing dan mengembangkan kehidupan rohani manusia dengan mengurus segala hal yang ada hubungannya dengan agama, peribadatan, kesusilaan, kerohanian yang sifatnya tetap, kekal, surgawi dan mengatasi kodrat”.*

*“Dengan menjamin ketentraman, norma-norma, kesejahteraan, budaya, dan hak-hak asasi, negara mempersiapkan suatu iklim yang perlu bagi perkembangan hidup keagamaan dan moralitas. Gereja Katolik dengan menjaga hidup keagamaan, moralitas, kejujuran, kesetiaan terhadap janji, keadilan, cinta kepada sesama, dedikasi terhadap pekerjaan dan lembaga; dengan cara mendidik untuk menaruh hormat kepada pemimpin, dan mengarahkan untuk bertindak seturut hukum, berarti Gereja membangun suatu dasar yang kokoh bagi masyarakat dan pemerintahan.”*

*“Para bangsawan serta muliawan pilihan rakyat itu bukan karena asal usulnya, melainkan karena luhurnya budi pekerti, perhatian, kemampuan, kepekaan dan kesusilaannya. Karenanya harus tanggap terhadap sifat dan keadaan bangsa serta tanah airnya, paham terhadap seluk-beluk pemerintahan, paham dan mendalami panas-perih, kesulitan dan penderitaan bangsa, paham terhadap gejolak nasional dan internasional, meyakini kewajiban dan tanggung jawabnya, penuh kesetiaan terhadap kesanggupan dan sumpahnya”*

*“Kemerdekaan jiwa itulah yang berani menolak dengan tegas apapun juga yang melemahkan perjuangan kita, yang merosotkan kesusilaan bangsa kita, meskipun meminat budi dan menawan hati, menyedapkan mata dan membujuk panca indra.”*

*“Kemerdekaan jiwa itulah yang akan menyelamatkan kita dari kolonialisme, yang berupa barang, uang, orang, ilmu, pandangan hidup, ideologi, kesenian, pertunjukan, bacaan, kesukaan, kebiasaan dan adat istiadat.” “Kemerdekaan jiwa itulah yang memberi hati untuk berani mempertahankan, menjunjung tinggi harta benda pusaka nasional warisan dari nenek moyang...”*

*Jiwa kita adalah merdeka, jika kita selalu menuntut apapun juga yang bersifat sungguh benar, sungguh baik, sungguh indah dengan leluasa..."*